



Research Article

Perempuan dan Kemiskinan: Studi Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Indramayu

Dewi Nurmalasari

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Wiralodra; dewi.nurmalasari@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial dan Kebijakan**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : June 12, 2024
Accepted : August 15, 2024

Revised : July 24, 2024
Available online : September 02, 2024

How to Cite: Dewi Nurmalasari. (2024). Women and Poverty: Case Study of Female Labor (TKW) in Indramayu Regency. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 1(1), 46-57. <https://doi.org/10.61166/policy.v1i1.3>

Women and Poverty: Case Study of Female Labor (TKW) in Indramayu Regency

Abstract. Women are often paired with poverty problems, structural and cultural obstacles seem to never stop entangling them. The choice to become a migrant worker has become a dream of a decent and prosperous life that for him cannot be relied on by anyone, including the government. With a more dominant economic background and low human resources, women are often powerless to get out of the problems that come to them. Even though it is widely depicted in the media about the grim portrait of migrant workers in various cases, the number of migrant workers continues to increase from year to year. Some of the underlying points are that the employment opportunities available at home are limited and labour wages abroad are much higher than those at home. As the second largest contributor of foreign exchange after oil and gas, TKW should receive more attention, including its rights to obtain protection as a citizen.

Keywords: Women, Poverty, Female Labor, Indramayu

Abstrak. Perempuan seringkali disandingkan dengan masalah Kemiskinan, hambatan struktural dan kultural seolah tidak berhenti menjerat. Pilihan untuk menjadi TKW pun menjadi mimpi akan kehidupan yang layak dan sejahtera yang baginya tidak bisa disandarkan kepada siapapun tidak terkecuali pemerintah. Dengan latar belakang ekonomi yang lebih dominan dan bekal SDM yang rendah membuat perempuan seringkali tidak berdaya untuk keluar dari masalah yang datang kepadanya. Meski banyak di gambarkan melalui media tentang potret suram TKW dengan berbagai kasus yang ada, jumlah TKW dari tahun ke tahun terus meningkat. Beberapa hal yang mendasari adalah kesempatan kerja yang tersedia di dalam negeri terbatas dan upah tenaga kerja di luar negeri yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat upah di dalam negeri. Sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, TKW seharusnya mendapat perhatian yang lebih termasuk pada hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan sebagai warga negara.

Kata Kunci: Perempuan, Kemiskinan, Tenaga Kerja Wanita, Indramayu

PENDAHULUAN

Tidak berlebihan kiranya jika TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa. Kontribusi TKI terhadap perekonomian nasional sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat, pada besarnya pemasukan devisa bagi Negara yang berasal dari TKI yang dikirim ke keluarganya di Indonesia. Diungkapkan oleh Ketua Pergantian Antar Waktu (PAW) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Adi Putra Tahir bahwa sumbangan devisa negara yang berasal dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih menduduki urutan kedua terbesar setelah sektor minyak dan gas (migas). Pada tahun 2009 saja devisa TKI melalui pengiriman remitansi ke Tanah Air mencapai US\$ 6,617 miliar. Nasib baik negara melalui suntikan devisa yang di topang TKI ini ternyata justru berbanding terbalik dengan nasib para pahlawan devisa tersebut.

Tentu belum lepas dari ingatan kita beberapa waktu yang lalu, kasus yang menimpa seorang buruh migran bernama Ruyati yang bekerja di Arab Saudi yang harus merenggang nyawa di tangan para eksekutor, dia didakwa membunuh majikannya dan harus menerima hukuman pancung, ironisnya pemerintah Indonesia menyatakan dengan tanpa malu ketidaktahuannya kasus Ruyati ini, sebelumnya kita juga disuguhi cerita pilu dari Sumiati, 23 tahun, TKW asal Nusa Tenggara Barat, mengalami penganiayaan berat dari sang majikan di Saudi Arabia. Sumiati mengalami penyiksaan diluar batas kemanusiaan seperti disetrika, tidak diberi makan, dipukul berkali-kali hingga bagian mulutnya mengalami kerusakan yang sangat parah. Tak kalah pahitnya adalah Kikim Komalasari, 36 tahun, TKW asal Cianjur, ditemukan meninggal dunia di kota Abha, Saudi Arabia, diduga dibunuh dan dibuang ke dalam tong sampah oleh majikannya.

Kasus TKW asal Indramayu juga tidak kalah tragis, Fatika binti Tarjono, 23 tahun TKW asal Desa Juntikedokan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu yang meninggal dunia akibat terjatuh dari lantai 6 rumah majikannya di syiria. Eti Darti, 30 Tahun, mengalami kekerasan seksual yang mengakibatkan korban hamil 4 bulan serta dipaksa untuk menggugurkan kandungannya dengan jalan di injak-injak perutnya sehingga mengalami infeksi dirahimnya. Daftar kasus lainnya yang sering menimpa TKI adalah masalah penipuan oleh sponsor, gaji tidak dibayar, kekerasan,

kematian, penyekapan, perkosaan, pemalsuan dokumen, dan perampasan dokumen oleh majikan. Hingga November 2010, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Indramayu mencatat jumlah TKI bermasalah mencapai 5.494 orang, naik 19,4% di-bandingkan tahun 2009 yang mencapai 4.602 orang. Jumlah ini tentu sangat kecil jika ditelusuri data secara faktual, karena lemahnya pendataan, selain itu tidak semua kasus yang menimpa TKI itu di laporkan.

Cerita pilu para pejuang devisa itu menjadi gambaran nyata bahwa betapa banyak kasus yang menimpa mereka namun kenyataannya tidak juga mengurangi minat masyarakat kita untuk berbondong-bondong untuk menjadi buruh diluar negeri. Bahkan Moratorium yang dikeluarkan pemerintah untuk pengiriman TKI tidak dianggap sebagai tidakan dan sikap proteksi pemerintah, tetapi justru menambah masalah bagi keberlangsungan hidup keluarga mereka, karena mereka adalah tulang punggung keluarganya, ada tanggung jawab sekolah, biaya hidup dan kesehatan anaknya, dimana semua itu dirasakan oleh masyarakat telah diaabaikan oleh pemerintah, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang bahwa kewajiban Negara adalah melindungi segenap warga Negara.

Migrant Care menyebutkan selama 2007 ditemukan 171 kasus kematian TKI di berbagai negara; 108 perempuan, 61 laki-laki dan 2 kasus tidak diketahui identitasnya. TKI yang menjadi korban kekerasan sebanyak 140 kasus; 125 perempuan dan 15 laki-laki. Tragisnya, TKI kita masuk juga ke negara yang tengah berperang sebagaimana kasus tahun 2007 lalu, sebanyak 50 orang TKI terjebak di Irak menjadi sandra sebagai korban trafiking, 9 di antaranya dari Indramayu. Dalam data tersebut kasus buruh migran perempuan atau yang biasa disebut TKW tercatat lebih banyak.

Berdasarkan data yang tercatat di Depnakertrans, penempatan TKI di luar negeri berjumlah setiap tahunnya antara 450 ribu sampai dengan 700 ribu selama periode 2005-2008. Angka kisaran tersebut adalah sekitar dua kali lipat dari angka penempatan TKI di luar negeri pada tahun 2002 yang hanya mencapai sekitar 275 ribu orang. Sebagian besar TKI yang ditempatkan di Negara-negara tersebut adalah perempuan dengan persentase sebesar 68,5 persen pada tahun 2005. Bahkan persentase TKI perempuan meingkat lagi menjadi sekitar 77 persen pada tahun 2008. Dilihat berdasarkan sektor pekerjaan, tampaknya sebagian besar TKI bekerja di sector informal yang umumnya adalah sector pembantu rumah tangga. Kecenderungan TKI bekerja di sector informal tersebut meningkat dari 58 persen pada tahun 2005 menjadi 70 persen pada tahun 2008.

Tabel 1 : Persentase Penempatan TKI di Sejumlah Negara menurut Jenis Kelamin dan Sektor, 2005-2008

Tahun	Jenis Kelamin			Sektor		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Formal	Informal	Total
2005	31.47	68.53	100	41.51	58.49	100
2008	23.15	76.85	100	30.06	69.94	100

Sumber: www.depnakertrans.go.id

Kabupaten Indramayu dikenal sebagai daerah pemasok TKI yang cukup besar, Seperti diketahui, Indramayu merupakan salah satu daerah pengirim TKI terbesar di Jawa Barat. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Indramayu, sepanjang 2006 sampai 2008, jumlah TKI asal Kabupaten Indramayu mencapai 25 ribu orang. Sedangkan dari data Ditjen Binapenta Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dari tahun 2008-2010, tercatat ada 95.581 orang TKI asal Kabupaten Indramayu. Sedangkan jumlah TKI yang pulang ke tanah air per Oktober 2010 sebanyak 31.921 orang.

Sebagian besar TKI itu bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan didominasi kaum perempuan. Selain negara-negara di kawasan Timur Tengah, para TKI juga banyak yang berangkat ke negara-negara Asia lainnya, seperti Singapura, Brunei Darusalam, Hongkong, Jepang, dan Taiwan. Para TKI itu pun selama ini telah menjadi pahlawan devisa yang bisa mendatangkan banyak uang ke dalam negeri. Data di Kantor Pos Indramayu menyebutkan, pada 2010, transaksi kiriman uang dari para TKI asal Indramayu melalui jasa Western Union mencapai sekitar 12.000 transaksi per bulan. Bila dihitung rata-rata per hari, maka transaksi pengiriman uang dari para TKI mencapai kurang lebih 4.000 transaksi per hari.

Dari jumlah transaksi tersebut, nilai uang yang dikirimkan para TKI mencapai kurang lebih Rp 1 miliar per hari. Jika dihitung per tahun, maka kiriman uang dari para TKI yang mengalir ke Indramayu bisa mencapai lebih dari Rp 300 miliar.¹ Peredaran uang yang masuk ke Indramayu juga tidak berbeda dengan peredaran masyarakat Indramayu yang terus masif untuk menjajal keberuntungan dengan bekerja di luar negeri, dan dengan alasan yang sama, yaitu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Lalu jika jumlah mereka selalu meningkat apakah hal ini menandai bahwa masyarakat Indramayu memang tidak pernah beranjak dari kemiskinan dan banyak yang berada pada kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan.

Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan pada buruh migran perempuan atau TKW untuk memotret wajah kemiskinan perempuan di Indonesia khususnya di Indramayu. Selain karena secara data disebutkan jumlah perempuan Indramayu yang bekerja sebagai buruh migran sangat tinggi dibandingkan laki-laki, perempuan juga dalam sejarahnya seringkali digambarkan pada kondisi yang kurang menguntungkan. Kaum perempuan masih saja terjebak dalam warisan kultur yang tidak jua beranjak seiring dengan masifnya gerakan-gerakan kaum perempuan dalam memperjuangkan haknya, salah satunya hak sebagai pekerja.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah : "Apa yang melatar belakangi banyaknya jumlah perempuan Indramayu menjadi buruh migran atau TKW"?

¹ <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/11/01/18/159142-tki-asal-indramayu-tewas-di-singapura>, diakses tanggal 8 juli 2011.

KONSEPTUALISASI KEMISKINAN

Beberapa perspektif kemiskinan.

Menurut Muhadjir Darwin (2005:6), kemiskinan dapat dirumuskan dalam dua kategori, yang pertama adalah kemiskinan absolut dan yang kedua kemiskinan relatif. konsep ini mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang/ keluarga. Kedua istilah itu menunjukkan pada perbedaan sosial (social distinction) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif, kategorisasi kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk.

Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan bahwa kemiskinan absolut adalah derajat kepemilikan materi atau standar kelayakan hidup orang atau keluarga yang berada di garis atau dibawah subsisten. Indikatornya sangat terukur, dimana ada standar kehidupan yang dikategorikan secara berjenjang, yakni dibawah garis kemiskinan, pada garis kemiskinan dan diatas garis kemiskinan. Selanjutnya Sayogyo (muhadjir:2000:6), merumuskan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Selain itu, rendahnya tingkat pendapatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan saana dan prasarana fisik dan kelangkaan modal atau miskin karena sebab alami.

Definisi kemiskinan.

Kemiskinan adalah konsep abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda tergantung dari pengalaman, perspektif, sudut pandang yang diambil, atau ideologi yang dianut. Pendekatan dalam memahami kemiskinan telah banyak mengalami kemajuan. Bila semula pengertian kemiskinan hanya ditekankan kurangnya pemilikan materi atau ketidak cukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka kini kemiskinan telah mengalami perluasan arti dengan menyentuh posisi individu dalam proses-proses pertumbuhan sosial serta akses dalam politik.

Dengan kata lain, kalau pendekatan lama, kemiskinan hanya didekati dari segi deprivasi dalam pendapatan/konsumsi/belanja, maka pendekatan baru menekankan pada deprivasi terhadap kemampuan sumber daya manusia seperti pengetahuan, standar kelayakan hidup, dan lebih menekankan lagi pada self-reporting, self esteem, partisipasi dan pemberdayaan.(muhadjir, hal 1) Menurut Specker (1993), kemiskinan mencakup berbagai hal, diantaranya: 1). kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal, 2). Gangguan dan tingginya resiko kejahatan, 3). Risiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya,4). Kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tak bisa hidup layak, dan 5). Kekurangan dan kehidupan sosial yang dapat ditunjukkan oleh ketertinggalan sosial, ketertinggalan dalam proses politik dan kualitas pendidikan yang rendah.

Sementara Menurut Muhadjir, secara umum kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan: "kekurangan dan atau ketidak layakan hidup menurut standar-standar tertentu, ketidak atau kurang mampuan fisik manusia, ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan"²

Mengukur Kemiskinan.

Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori , yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD \$1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah \$2 per hari, dg batasan ini maka diperkirakan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari \$1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari \$2/hari."^[1] Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001.^[1] Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan \$1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai dari \$1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia berkembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.³

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Potret Suram Buruh Migran

Indonesia merupakan negara pemasok buruh migran terbesar kedua di dunia setelah Filipina. Lebih dari 90% sebagai pekerja rumah tangga, dan 80% mereka adalah perempuan. Buruh Migran, atau pekerja migran adalah orang yang berpindah (migrasi) dari wilayah kelahiran ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat baru tersebut untuk jangka waktu tertentu dan relatif menetap. Terdapat dua jenis buruh migran, yaitu buruh migran domestik dan internasional. Definisi ini terkait dengan hubungan teritorial negara tertentu. Buruh Migran domestik

² Muhadjir M. Darwin, *Memanusiakan Rakyat*, Penerbit Benang merah: Yogyakarta, 2005, hal 1-2.

³ www.wikipedia.or.id, diakses tanggal 23 juni 2011

melakukan perpindahan di wilayah dalam satu teritori atau wilayah suatu negara. Sementara, buruh migran internasional melakukan migrasi keluar dari wilayah suatu negara, atau buruh yang bekerja di wilayah yang bukan negara tempat asal migrasi tersebut.⁴ Sementara Tenaga Kerja Indonesia (disingkat TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW).TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa karena dalam setahun bisa menghasilkan devisa , tetapi dalam kenyataannya, TKI menjadi ajang pungli bagi para pejabat dan agen terkait. Bahkan di Bandara Soekarno-Hatta, mereka disediakan terminal tersendiri (terminal III) yang terpisah dari terminal penumpang umum. Pemisahan ini beralasan untuk melindungi TKI tetapi juga menyuburkan pungli, termasuk pungutan liar yang resmi seperti punutan Rp.25.000,- berdasarkan Surat Menakertrans No 437.HK.33.2003, bagi TKI yang pulang melalui Terminal III wajib membayar uang jasa pelayanan Rp25.000. (saat ini pungutan ini sudah dilarang) Pada 9 Maret 2007 kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri dialihkan menjadi tanggung jawab BNP2TKI. Sebelumnya seluruh kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan oleh Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Depnakertrans.⁵

Jerat Kemiskinan Buruh Migran Perempuan/ TKW Indramayu.

Konstruksi sosial ekonomi masyarakat Indramayu terbangun lewat basis ekonomi agraris. Akan tetapi, hamparan luas sawah dan posisi Kabupaten Indramayu sebagai penghasil 30 persen produksi beras nasional tidak terlalu terasa bagi penduduk pinggiran. Akar persoalannya adalah kepemilikan tanah. 30 persen masyarakat adalah tuan tanah, sedangkan 70 persen lainnya adalah buruh tani. Tidak ada pilihan bagi rakyat setempat untuk memilih profesi selain menjadi buruh tani. Dengan pola setahun dua kali panen, masyarakat harus hidup dalam roda sejarah yang senantiasa berbalut kemiskinan. Lagi pula untuk sekadar menyewa lahan pun mahal. Untuk menyewa tanah seluas satu bata (kira-kira 1.400 m²), mereka harus rela menyerahkan lima-tujuh kuintal gabah kering hasil panen, jumlah yang terlalu tinggi.

Dari konstruksi kemiskinan masyarakat Indramayu tersebut, sudah tentu yang paling merasakan dampaknya adalah kaum perempuan. Bagaimana tidak, di Indramayu peran perempuan masih termarginalkan (terpinggirkan). Padahal banyak perempuan di sana menjadi penopang keluarga dan sumber kekuatan buat anak-anaknya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Mestinya sudah sepatutnya proses membangun Indramayu kembali turut melibatkan perempuan dan posisinya setara dengan pihak laki-laki. Akibat dari modernisasi pertanian,

⁴ http://buruhmigran.or.id/wiki/index.php?title=Kamus_Istilah_Buruh_Migran, diakses tanggal 3 juli 2011

⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/TKW>

perekonomian Indramayu mengalami kemunduran. Angka pengangguran melonjak dua kali lipat dan inflasi membuat biaya hidup meningkat drastis. Perempuan yang kemudian menjadi tulang punggung keluarga adalah kelompok yang paling merasakan dampaknya. Mereka semakin tidak berdaya ketika sulitnya mendapatkan sarana dan kesempatan yang setara untuk hidup layak. Kondisi demikian kemudian meminggirkan hak sosial dan ekonomi perempuan.

Sebagai penopang ekonomi keluarga, perempuan di Indramayu mengagumkan. Mereka bukan hanya bekerja keras mengurus rumah tangga di rumah. Banyak kaum perempuan bekerja sebagai pencari nafkah utama. Mereka pergi ke luar negeri sebagai buruh migran, demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perempuan di Indramayu memegang peranan penting dalam rumah tangga. Apalagi di antara mereka adalah janda-janda (perempuan kepala keluarga), sehingga harus bertahan hidup sendiri.

Semangat mempertahankan hidup juga telah menggarut garis sejarah perempuan Indramayu. Garis itu dibuat oleh kisah para perempuan pemberani yang rela bekerja ke luar negeri meninggalkan anak suami. Garis kisah itu mulai menggores sejak tahun 1997, ketika seluruh negeri terkoyak oleh badai ekonomi. Banyak perempuan Indramayu melawan badai ganas sebagai TKW mengadu nasib di negeri rantau. Menjadi TKW adalah satu-satunya pilihan menuruti harapan perubahan nasib. Gelombang ingar-bingar migrasi pekerja itu kemudian meletakkan Kabupaten Indramayu sebagai pemasok devisa negara terbesar dari TKI. Risikonya memang besar, tetapi prospeknya juga besar. Konstruksi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang patriarkis ini membuat peran perempuan tak dikenal dan menjadi pelaku pembangunan yang tidak terlihat.⁶

Selain itu mencatat bahwa migran Indonesia (TKI) cenderung menggunakan uang kiriman untuk membayar hutang, membangun rumah, membeli barang mewah dan konsumsi keluarga yang tinggal di Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan yang ditemukan di Negara lain seperti Filipina dimana pengiriman uang diinvestasikan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan produktif. Berdasarkan catatan Bank Dunia, dengan adanya pola penggunaan uang kiriman oleh TKI yang umumnya untuk konsumsi bukan untuk kegiatan produktif, keluarga TKI akhirnya menjadi tergantung pada pengiriman uang dan akibatnya para TKI terjebak dalam siklus migrasi. Meskipun TKI telah memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar bagi Negara, bukannya tidak ada permasalahan yang muncul. Berbagai masalah yang menimpa tenaga kerja Indonesia yang sebagian besar adalah wanita sering diungkap berbagai media

Jaring-jaring kemiskinan Perempuan

Pembagian kerja menurut jenis kelamin rupanya universal hampir sepanjang sejarah, dalam masyarakat dimana pembagian tersebut bersifat hirarkhis dimana laki-laki meletakkan perempuan lebih rendah. Adanya segregasi/pemisahan pekerjaan menurut jenis kelamin adalah mekanisme utama dalam masyarakat

⁶ <http://www.fahmina.or.id/penerbitan/warkah-al-basyar/516-perlindungan-tkitkw-agenda-perjuangan-bersama.html>

kapitalis yang mempertahankan superioritas laki-laki diatas perempuan, segregasi tersebut kemudian yang menyebabkan upah tenaga kerja perempuan menjadi lebih murah dalam pasar tenaga kerja. Sistem patriarki masih melihat bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga sehingga buruh laki-laki lebih berhak atas tunjangan anak dan isteri. Sedangkan perempuan yang bekerja, tidak mendapat tunjangan suami dan anak, padahal kenyataannya banyak dari buruh perempuan saat ini berperan sebagai kepala keluarga.⁷

Sebagai pekerja, keberadaan globalisasi dianggap mempermudah jalannya perempuan untuk terlibat dalam permainan pasar bebas, namun di satu sisi tanpa mereka sadari pasar bebas secara tidak langsung telah menjebak mereka sebagai kelas yang paling tereksplorasi, hal ini melihat bahwa meskipun kesempatan bekerja bagi perempuan telah terbuka bagi semua ras dan kelas, ternyata para perempuan masih mengalami diskriminasi yang dilakukan majikan, perusahaan ataupun pemerintah. Mereka dianggap marjinal dan bagian dari pekerja temporer, selain itu meski perempuan yang bekerja semakin meningkat ternyata tidak sebanding lurus dengan perubahan nasib para pekerja perempuan yang harusnya lebih menguntungkan. Bahkan disaat jaman terus berubah dan kemajuan mulai merambah disegala bidang, mengapa semakin membuat perempuan tidak berdaya, karena nyaris tidak ada ruang yang menguntungkan bagi perempuan, malah sebaliknya, perempuan semakin terseok memperjuangkan nasibnya ditengah derasnya arus globalisasi.

Persoalan perempuan miskin tidak hanya terkait dengan ketidak setaraan relasi gender antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga relasi kekuasaan antara kelompok yang kuat dengan kelompok yang lebih miskin. Bagi perempuan miskin persoalan kemiskinan secara ekonomi seringkali meminggirkan persoalan-persoalan gender yang dinilai sebagai sesuatu yang wajar karena ada beban-beban persoalan yang lebih berat yaitu kemiskinan sendiri.

Dunia masih menganggap yang paling memikul beban kemiskinan adalah kaum perempuan. Beban ini makin bertambah berat karena perempuan tidak dapat mengakses kesempatan ekonomi, kepemilikan lahan dan lain-lain. Dari 66 penelitian yang dilakukan oleh International Research Center for Woman (IRCW) pada era 1980-an ditemukan fakta bahwa keluarga berkepala perempuan lebih miskin daripada laki-laki.

Di Amerika, hampir seluruh keluarga miskin dibiayai oleh perempuan, tanpa suami. Iklim ekonomi global yang tidak menentu serta perang di mana-mana makin memperburuk keadaan ini. Menanggapi pandangan tersebut, kita perlu mencermati dan menelusuri permasalahan yang terjadi. Jika dalam masalah ekonomi segala sesuatu diukur dengan materi, maka perempuan yang tidak menghasilkan uang dianggap lebih rendah nilainya. Jika sudah demikian, upaya pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan perannya dalam mendongkrak perekonomian negara secara langsung.

⁷ www.prp-indonesia.org/en/Perempuan_Dalam_Politik_Kelas_Pekerja, diakses tanggal 7 November 2007

Negara kemudian mengembangkan kebijakan dan program-program untuk merangsang distribusi yang adil bagi setiap rumah tangga. Namun, negara dalam hal ini hanya menyediakan sumber daya agar terbuka peluang bagi perempuan untuk mengaksesnya, tanpa memperhatikan apakah distribusi tersebut sudah berjalan baik dan mencukupi bagi setiap orang yang membutuhkannya atau belum. Akhirnya, penyelesaian Jelih bertumpu pada perempuan-perempuan itu sendiri yang harus mengatasi persoalan kemiskinannya.

Dalam posisi seperti itu, peluang bekerja bagi perempuan menjadi penting untuk diperjuangkan. Peran domestik perempuan dianggap tidak bermakna dalam perekonomian. Seorang ibu rumah tangga dianggap warga negara kelas dua. Faktor nonmateri seperti cinta kasih, dedikasi, dan kesetiaan tidak dimasukkan dalam teori ekonomi, bahkan dalam ekonomi neoklasik sekalipun. Padahal, seorang ibu rumah tangga memiliki andil yang besar bagi perekonomian suatu negara, walaupun kontribusinya tidak langsung.

Tak seperti pada era 1970-an di mana peran perempuan belum terlalu diperhitungkan, pada 1980-an perempuan mulai diperhatikan perannya dalam pembangunan. Kini peran tersebut makin bergeser. Saat ini perempuan harus pula terlibat sebagai agen pembangunan. Konsep pendekatan pembangunan bergeser dari *woman in development* (WID) menjadi *gender and development* (GAD). Pendekatan GAD sangat menekankan kesadaran relasi yang selama ini dipandang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, perempuan harus turut berperan sebagai penentu kebijakan. Pendekatan model GAD ini "bukan tidak mungkin akan kembali menimbulkan persoalan-persoalan baru. Dengan demikian, yang dibutuhkan saat ini adalah suatu kerangka berpikir yang baku dengan asas yang benar, sehingga mampu menyelesaikan seluruh masalah sampai ke akarnya.

Betulkah perempuan paling memikul beban kemiskinan dunia? Sebab, apabila diamati fakta kehidupan manusia, kemiskinan tidak hanya menimpa perempuan, tetapi juga laki-laki. Kemiskinan tidak hanya ada pada keluarga yang dikepalai perempuan, tetapi bisa juga pada keluarga yang dikepalai laki-laki. Kemiskinan tidak hanya ada pada masyarakat yang memiliki budaya patriarki, tetapi juga ada pada masyarakat yang menolak budaya tersebut (seper-li Amerika dan Eropa). Bahk.m kemiskinan perempuan tidak menjadi masalah pada beberapa negara yang memiliki budaya patriarki seperti negara-negara Timur Tengah. Dengan demikian, kemiskinan bukan hanya masalah perempuan, melainkan juga masalah manusia pada umumnya.

Berbagai Upaya Perbaikan Sistem Perlindungan TKW oleh Pemerintah.

Berbagai upaya perbaikan sistem perlindungan maupun yang bersifat *class action* dalam penanganan problem per-TKI-an kita akui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah beserta jajarannya telah melakukan banyak hal. Mengenai perlindungan tenaga kerja, sejumlah Undang-Undang dan kebijakan pemerintah berhasil dirumuskan, di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, diikuti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(BNP₂TKI). Selain itu, sejumlah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Republik Indonesia telah diterbitkan, antara lain nomor PER 04/MEN/II/2005 tentang Penyelenggaraan Pembekalaan Akhir Pemberangkatan TKI ke luar Negeri, PER 05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri, PER 07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon TKI, PER 19/MEN/V/2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan sebagainya. Namun hasilnya, belum seperti yang diharapkan bahkan menyisakan “PR” yang tidak sederhana karena menyangkut pelanggaran hak hidup dan hak memperoleh lapangan pekerjaan yang nyata-nyata secara konstitusi dijamin oleh negara, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, menyelesaikan masalah kemiskinan yang menimpa banyak perempuan di dunia saat ini tidak hanya dengan memberikan alternatif untuk perempuan agar bisa dengan bebas mengakses sumber daya ekonomi. Penyelesaian seperti ini bersifat individual dan parsial. Yang kita butuhkan adalah penyelesaian yang berangkat dari pandangan yang universal tentang perempuan. Pandangan dimaksud ialah pandangan yang melihat perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang hidup berdampingan secara harmonis dan damai dengan laki-laki. Tentu saja hanya dengan hidup berdampingan inilah kelestarian umat manusia akan terjamin.

Kemiskinan Sebagai Bagian Tanggung Jawab Pemerintah

Kemiskinan adalah salah satu masalah dari sekian masalah manusia dalam kehidupan. Kemiskinan tidak dipandang sebatas sebagai bagian dari aspek ekonomi yang tidak terkait dengan aspek yang lain. Oleh karena itu, perlu sebuah alternatif penyelesaian yang tuntas dan menyeluruh serta tidak mengakibatkan adanya masalah baru bagi manusia dalam aspek yang lain. Penyelesaian ini harus dilaksanakan secara sistemik, tidak cukup hanya oleh individu-individu, agar setiap individu riapusia mendapat kehidupan yang sama.

Kemiskinan menjadi persoalan karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini akan membawa dampak pada aktivitas lain dan menghambat manusia untuk meraih cara hidup yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap individu manusia agar tidak ada hambatan bagi manusia untuk menjalankan kehidupan ini menuju kehidupan yang ideal yang menjamin kemuliaannya sebagai manusia.

Negara selayaknya menjamin distribusi kekayaan/sumber daya kepada seluruh individu rakyat, yaitu menjamin distribusi ini bagi pemenuhan kebutuhan pokok individu secara keseluruhan. Negara berkewajiban memberi peluang kepada setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pelengkapannya. Jaminan ini berupa seperangkat hukum yang ter-sistem, seperti hukum kebolehan memiliki dan kebolehan bekerja pada sumber-sumber ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, dan upah-mengupah serta hukum tentang pemeliharaan urusan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan sarana umum lainnya.

PENUTUP

Buruh migrant seharusnya menjadi perhatian dari *stakeholders*, selain juga perlu adanya sosialisasi pemahaman terhadap hak-hak mereka sebagai pekerja, juga perlu adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk perlindungan hukum. Moratorium mungkin saja sebagai jalan upaya pembenahan dalam kasus TKW, namun juga bagaimana solusi bagi mereka yang merasa bahwa jalan atau jalan mereka memenuhi kebutuhan hidupnya itu terhambat atau bahkan tertutup, ibarat kita biasanya melewati jalan itu, meski jalan itu berbahaya tapi tak ada jalan lain untuk sampai kepada tujuan, lalu tiba-tiba jalan itu ditutup dengan alasan berbahaya tanpa diberi alternatif jalan lain.

Di Indramayu sendiri sebagai daerah pemasok TKW terbanyak tentu telah mendapatkan keuntungan dari mereka, terlepas dari mereka ilegal atau tidak. Oleh karena itu penertiban harus dimulai dari yang paling sempit, pendataan harus lebih diperketat, paling tidak setiap RT harus punya bank data terkait dengan jumlah TKW yang berangkat. Selanjutnya, yang perlu dilakukan setiap ada keluarga yang kehilangan kontak dengan keluarganya melaporkan kepada RT setempat, lalu bisa mengadvokasi dengan menjaring pihak-pihak terkait.

REFERENSI

- Ibrahim. (2024). KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DI KABUPATEN INDRAMAYU (Studi Pada Program Pe-Ri Kabupaten Indramayu). *Jurnal Aspirasi*, 14(2), 76–85. Retrieved from <https://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/124>
- Juliasnyah, R. . I. ., Natsir, L. F., & Pangestu, M. A. . (2024). PARTISIPASI MASYARAKAT DESA PABEAN UDIK DALAM PEMBERDAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DESA PABEAN UDIK. *Jurnal Aspirasi*, 14(01), 61–69. <https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i01.108>
- Kartini, M. . (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) (STUDI KASUS DI DESA KARANGSONG KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU). *Jurnal Aspirasi*, 14(01), 7–18. <https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i01.116>
- Muhadjir M. Darwin, *Memanusiakan Rakyat*, Penerbit Benang merah: yogyakarta, 2005.
- Suryani, & Andayani Listyawati. (2024). PERAN FORUM KESERASIAN SOSIAL DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN WARGA. *Jurnal Aspirasi*, 14(2), 88–100. <https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i2.126>
- <http://www.fahmina.or.id>
- <http://id.wikipedia.org>
- <http://buruhmigran.or.id>
- www.depnakertrans.go.id
- www.migrancare.com
- www.kemenegpem.go.id